

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta

Atmasasmita, Romli. (2020). *Reformasi Hukum Pidana di Era Digital*. Jakarta: Prenada Media.

Bambang Sunggono. (2001). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Edi Putra hasibuan “*Hukum kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*” hlm 119. Depok; Rajawali Pers, 2021

Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT.Bina Ilmu, Surabaya.

Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Satjipto Raharjo. 1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Alumni. Bandung, hal 121.

Seto Mulyadi. (2005). *Perlindungan Anak: Perspektif Hak Anak dalam Hukum Nasional dan Internasional*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Sitompul, A. (2010). *Hukum Internet*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

B. Jurnal

Haikal, Muhammad, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Pelecehan Seksual, Penegakan Hukum, and I Pendahuluan. “Analisis Kasus Pelecehan Seksual Child Cyber Grooming Di Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana” 6, No. 7 (2024): 223–32.

Nurlia, Eva, Puti Priyana, Fakultas Hukum, And Universitas Singaperbangsa. “Grooming Terhadap Anak Korban Child Grooming Di Media Sosial Dan Upaya Penanggulangannya” 9, No. 6 (2022): 3043–50.

Nasution, A., Nugroho, R., & Syah, R. (2025). *Model Kolaboratif Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual Digital*. Jurnal Perlindungan Anak Digital, 5(1), 14–28.

Putri, A., & Lestari, D. (2024). *Analisis Yuridis terhadap Celah Hukum Grooming Online di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 12(2), 177–189.

Ri, Sekretariat Jenderal Mpr. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.” *Jdih.Bapeten.Go.Id*, 1945, 1–21.
<https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>.

Salamor, Anna Maria, Astuti Nur Fadillah, Patrick Corputty, And Yonna Beatrix. “Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring” 26, No. 28 (2020): 490–99.
Doi:10.47268/Sasi.V26i4.381.

Sutrisno, Endang, And Yondri Yondri. “Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 17, No. 2 (2018): 41–52. Doi:10.31941/Pj.V17i2.541.

Undang-Undang Republik Indonesia. “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999.” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, No. 39 (1999): 1–45.

Yusep Mulyana. “Kejahatan Seksual Daring Terhadap Anak Dengan Modus Operandi Melalui Media Game ‘ Online ’” 4, No. 3 (2023): 5478–87.

Vemprala, V., & Bajaj, A. (2025). *Child Safety and Psychological Harm in Digital Play Environments: An Empirical Study*. *Journal of Cyber Child Development*, 18(1), 45–63.

C. Peraturan Perundang – Undangan

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- f) Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC) – Diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990.

D. Sumber Online

- a) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2024). *Laporan Tahunan KPAI: Jalan Terjal Perlindungan Anak*. Jakarta.
- b) Heriyani, Wiwie, & Arradian, Danang. (2024). "Kasus *Child Grooming* di Game Online Marak, Orang Tua Harus Waspada". *Tekno.sindonews.com*.
- c) KPAI & ECPAT Indonesia. (2023). *Studi Kasus Eksploitasi Seksual Anak Online di Indonesia*.
- d) Asshiddiqie, Jimly. "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara." *roboguru.ruangguru.com*. Diakses 8 Mei 2025.
- e) UNICEF Indonesia. (2023). *Protecting Children in the Digital World*. [Online Report].
- f) Komnas HAM. (2022). *Hak Anak dan Perlindungan dari Kekerasan Seksual*. [Laporan Publik].
- g) Bappenas RI. (2023). *Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2020–2024*
- h) United Nations Human Rights Council. (2011). *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*. Geneva: OHCHR.
- i) ANTARA News. (25 Oktober 2023). *Polri: Literasi digital tekan kasus kekerasan seksual pada anak*.
- j) PPPA. (3 Juli 2024). *Simfoni PPA: Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online*.
- k) PPPA. (12 Juli 2024). *Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) meningkat di 2024*.